

KETERLIBATAN PENDIDIKAN DALAM KANCAH PENDEWASAAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh

Kus Eddy Sartono

Abstrak

Implementasi demokrasi dalam kehidupan politik ke-negaraan menuntut taraf kecerdasan tertentu, tidak saja bagi para pemimpin, tetapi bagi seluruh rakyat karena mekanisme demokrasi hanya akan berjalan sehat jika semua rakyat memiliki kesadaran dan pengertian akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Keadaan semacam ini mau tidak mau menuntut pendidikan untuk berperan serta di dalamnya.

Bagi bangsa Indonesia pendidikan politik sudah menjadi keputusan politik. Oleh karena itu, pendidikan politik harus dilaksanakan. Meskipun belum mempergunakan istilah pendidikan politik secara eksplisit, pendidikan formal telah melaksanakan pendidikan politik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi baik secara monolitik maupun secara integratif. Pendidikan politik juga dilakukan melalui pendidikan nonformal, melalui organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi kepemudaan. Di samping kedua jalur pendidikan tersebut, pendidikan politik juga berlangsung melalui pendidikan masyarakat, dalam hal ini media massa, pengalaman langsung serta sosialisasi politik dalam pergaulan sangat besar peranannya.

Ada korelasi positif antara pemilihan umum dengan pendidikan politik. Di satu pihak, pemilihan umum dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, di lain pihak pendidikan politik akan memberikan arti terhadap pemilihan umum. Melalui pendidikan politik yang berhasil, pemilihan umum akan lebih berfungsi dalam kehidupan demokrasi dan kehidupan kenegaraan pada umumnya.

Pendahuluan

UUD 1945 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Ke-
daulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat." Ketentuan tersebut me-
nunjukkan bahwa Indonesia adalah negara *demokrasi*. Dalam
sistem kenegaraan kita, kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat yang dalam struktur kenegaraan diwujudkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Suatu negara adalah demokratis apabila dalam negara itu hak-hak asasi manusia diakui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan di dalam struktur kenegaraan dan pemerintahan secara nyata menempatkan kedaulatan dan kekuasaan negara di tangan rakyat (Sudiharto Djiwandono, 1983:192). Sistem pemerintahan demokrasi menuntut pemerintahan yang terbatas kekuasaannya (a limited government), yang melakukan tugas pemerintahannya berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan yang ditentukan oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Praktik penyelenggaraan demokrasi tentu tidak selalu sama antara negara satu dengan negara lainnya. Menurut Sudiharto Djiwandono, (1983:194) perbedaan ini terjadi karena masing-masing bangsa mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri yang dalam prosesnya selama berabad-abad telah membentuk kepribadian, budaya, identitas dan pandangan bangsa tentang kehidupan dengan segala aspeknya. Bagi bangsa Indonesia asas-asas demokrasi ingin diwujudkan sesuai dengan persepsi bangsa Indonesia yang tumbuh dan berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila.

Oleh karena itu, demokrasi Indonesia disebut sebagai *Demokrasi Pancasila*. Secara umum dapat diartikan bahwa asas demokrasi di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirumuskan sebagai sila keempat dari Pancasila dengan dilandasi oleh filsafat Pancasila sebagai suatu keseluruhan (Yoga Soegama, 1986:14). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan konsep demokrasi yang sangat lengkap.

Namun, bagaimanapun sempurnanya konsep demokrasi, implementasinya di dalam tata kehidupan politik kenegaraan menuntut taraf kecerdasan tertentu tidak saja bagi para pemimpin, tetapi bagi seluruh rakyat karena mekanisme demokrasi hanya akan berjalan sehat apabila rakyat memiliki kesadaran dan pengertian akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Tulisan ini akan mengkaji bagaimanakah keterlibatan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat dalam rangka pendewasaan implementasi demokrasi di Indonesia, serta bagaimanakah hubungan antara pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dengan pendidikan politik rakyat.

Demokrasi di Indonesia

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau "government or rule by the people" (Miriam Budiardjo, 1977:50).

Demokrasi yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional, hal ini tampak jelas dari sifat-sifat dan ciri-ciri yang tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar kita juga menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

I. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaad). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaad), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaad).

II. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar).

Berdasarkan dua istilah "Rechtsstaad" dan "Sistem Konstitusi" maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar UUD 1945 adalah demokrasi konstitusional (Miriam Budiardjo, 1977:51).

Di samping itu, demokrasi Indonesia juga diwarnai oleh asas-asas demokrasi perwakilan. Pola dasar perwakilan dalam kehidupan politik kebangsaan diatur dalam UUD 1945. Bangsa Indonesia mewakilkan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di dalam bernegara ("Kedaulatan") kepada suatu lembaga permusyawaratan, yang terjelma menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam pasal-pasalnya UUD 1945 secara jelas merumuskan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, hanya pelaksanaannya diwakilkan secara sepenuhnya dan tidak terbagi, kepada lembaga permusyawaratan (MPR). Berdasarkan pola pemikiran yang demikian kita dapat beranggapan bahwa dalam hal tertentu maka kata akhir tetap pada rakyat, misalnya pada referendum (ultra democratic device) sehingga

tidak ada penyerahan kekuasaan tertinggi rakyat kepada lembaga perwakilan (*pactum subjectionis*) atau pengambilalihan (*usurpatie-absorptie*) kekuasaan tertinggi tersebut seperti pada sistem diktator (Padmo Wahyono, 1987:388).

Bagian dari lembaga permusyawaratan adalah lembaga perwakilan rakyat. Lembaga ini terjelma dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengisian keanggotaan DPR dilakukan atau diwakilkan kepada organisasi kekuatan sosial politik melalui pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang.

Pemilu merupakan sarana inti demokrasi (Rusli karim, 1991:1). Melalui pemilu rakyat berperan serta dalam memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Keterlibatan rakyat dalam pemilu tentunya dilandasi oleh suatu pemahaman akan arti pentingnya Pemilu bagi kehidupan politik kenegaraan, kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di sinilah letak pentingnya pendidikan politik bagi warga masyarakat.

Pendidikan Politik di Indonesia

Seperti negara-negara lainnya, yang baru memperoleh kemerdekaannya setelah berakhirnya Perang Dunia II, Indonesia pada tahun-tahun awal masa kemerdekaannya memberikan perhatian yang sangat besar pada pembangunan di bidang pendidikan dalam upaya mengisi kemerdekaan.

Pembangunan bidang pendidikan ini umumnya ditujukan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dari sistem pendidikan kolonial kepada sistem pendidikan nasional yang lebih relevan dengan kepentingan nasional (Sudiharto Djiwandono, 1983:195).

Perkembangan jaman yang begitu pesat telah menuntut pendidikan untuk berangsur-angsur mengubah polanya. Dahulu pendidikan pada umumnya hanya menekankan aspek pengembangan kecerdasan intelektual dan penguasaan keterampilan, aspek pengembangan kepribadian dikesampingkan atau diserahkan kepada lembaga lain (lembaga keagamaan dan lingkungan keluarga, misalnya). Perkembangan zaman karena proses modernisasi lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan semakin mengendur perannya, maka pendidikan formal mau tidak mau harus mengisi perannya. Akibatnya

pendidikan formal juga melibatkan diri dalam upaya pembentukan kepribadian dan mentalitas anak didik.

Sehingga melalui pendidikan formal tidak saja dihasilkan orang yang terampil, cerdas dan berpengetahuan luas, akan tetapi juga akan menampilkan manusia-manusia yang berkepribadian dan bermental yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kenyataan ini jika kita kaitkan dengan kehidupan kenegaraan maka dapat kita artikan bahwa pendidikan formal juga melakukan pendidikan politik, dengan kata lain, pendidikan formal melalui kegiatan kurikulumnya juga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kebangsaan yang berlaku dalam kehidupan politik kenegaraan (Sudiharto Djiwandono, 1983:196). Meskipun dalam praktik pelaksanaan tidak secara terbuka, tetapi melalui kurikulum terselubung, baik secara monolitik maupun secara integratif. Secara monolitik dalam arti berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran, untuk tingkat dasar dan menengah melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sedangkan untuk pendidikan tinggi melalui mata kuliah Pancasila (Penataran P4), Pendidikan Kewiraan serta Filsafat Pancasila, di samping melalui teknik integratif dengan cara menggabungkan pada mata pelajaran yang relevan.

Disembunyikannya istilah pendidikan politik karena masih adanya pemahaman yang keliru pada masyarakat kita yang mengartikan politik adalah kotor, penuh dengan konflik, identik dengan partai politik dan pemahaman negatif lainnya yang perlu dijauhkan anak didik. Gejala ini tentunya akan sangat memprihatinkan bila dibiarkan berlarut-larut. Pandangan masyarakat perlu diluruskan, orang tidak perlu takut politik dan menjauhi politik karena sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, setiap saat secara terus-menerus kita dilibatkan dalam kehidupan politik. Politik selalu terdapat dalam setiap segi kehidupan manusia (Andre Bayo Ala, 1985:1).

Terlepas dari permasalahan terselubung atau terbuka, pada prinsipnya pendidikan politik adalah penting. Pembangunan politik di negara kita yang pada dasarnya ditujukan ke arah pemantapan demokrasi Pancasila, upayanya tidak hanya menyangkut kegiatan pengembangan kelembagaan politik, mekanisme hubungan antarlembaga, tetapi juga upaya untuk meningkatkan pengertian dan kesadaran rakyat akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat.

Sesungguhnya tanpa kita sadari proses penyadaran akan hak, kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai warga negara dapat berjalan dengan sendirinya melalui proses sosialisasi politik (Sudiharto Djiwandono, 1983:199). Pergaulan dengan masyarakat, akan terjadi interaksi sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan kemasyarakatan, termasuk kehidupan politik kenegaraan. Proses ini terjadi secara bebas sehingga risiko terjadi salah arah sangat besar. Unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila harus dicegah dan diupayakan agar tidak berkembang meracuni masyarakat kita. Kenyataan ini semakin memperkuat argumentasi perlunya pendidikan politik dilakukan secara sadar dan terencana demi kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pendidikan politik bagi bangsa kita telah menjadi suatu keputusan politik, sebagaimana ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang menyebutkan pendidikan politik rakyat ditingkatkan agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Berpangkal tolak dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut maka pendidikan politik harus dilaksanakan melalui berbagai macam jalan. Menurut Sudiharto Djiwandono (1983:200) ada tiga jalan yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, melalui pendidikan formal meskipun tidak mempergunakan istilah pendidikan politik secara eksplisit. Kedua adalah melalui pendidikan nonformal, melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi kepemudaan. Difokuskannya pada organisasi kepemudaan ini didasari oleh tradisi yang cukup lama di Indonesia dan telah terbukti peranannya dalam perjuangan nasional sejak masa kolonial, masa revolusi dan masa pembangunan sekarang ini. Jalan yang ketiga, pendidikan politik dilaksanakan melalui pendidikan masyarakat dan dalam hubungan ini peranan media massa, baik media cetak maupun elektronika tentu sangat besar.

Pendidikan politik, seperti juga pendidikan pada umumnya tentu juga mengandung risiko. Suatu sistem pendidikan mungkin saja tidak mencapai hasil sebagaimana ditetapkan semula karena adanya kesalahan-kesalahan atau kelemahan

tertentu di dalamnya. Ada seperangkat komponen yang saling menunjang keberhasilan pendidikan, antara lain kurikulum yang relevan, sarana fisik, metode penyampaian pelajaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah unsur pendidik yang melaksanakan pendidikan (Sudiharto Djiwandono, 1983:200). Peranan pendidik adalah sangat vital dan menentukan dalam upaya pembentukan sikap, watak, kepribadian, pandangan, serta tingkah laku. Perbuatan dan contoh konkrit kepribadian pendidik sangat menunjang pembentukan pribadi anak didik. Oleh karena itu, pendidik (guru) perlu dipersiapkan secara matang tidak saja secara intelektualnya, tetapi juga kepribadian dan mentalitasnya.

Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik

Pemilu dapat diartikan sebagai cara atau sarana untuk mendudukkan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam roda pemerintahan (Haryanto, 1984:81). Pemilu dapat pula diartikan sebagai sarana demokrasi penting, ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Sudiharto Djiwandono, 1983:201).

Dengan demikian, pada hakikatnya pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakil-wakilnya, pejabat-pejabat politik dan pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan negara (Andre Bayo Ala, 1985:66). Kemudian, pengertian pemilihan umum juga dapat kita temukan dalam perundang-undangan kita, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1983 dan UU nomor 1 tahun 1985 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa "Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia."

Dari beberapa pengertian tentang pemilihan umum di atas jelaslah bahwa pemilihan umum merupakan sarana penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara, serta merupakan keikutsertaan rakyat secara nyata dalam kehidupan politik kenegaraan. Melalui pemilihan umum masyarakat memunculkan para calon-calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut berdasarkan nilai-nilai yang berlaku sehingga memunculkan pemimpin yang diakui atau memperoleh pengakuan masyarakat. Di samping itu, melalui pemilihan umum,

anggota masyarakat dapat merasakan partisipasinya dalam pemerintahan. Sebab, melalui kelembagaan tersebut masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan.

Oleh karena itu, pemilihan umum sering kali dijadikan ukuran sejauh mana kadar demokrasi dari suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi (Sudiharto Djihadono, 1983:201). Setiap pengamat politik selalu ingin mengetahui seberapa jauh pemilihan umum benar-benar dilaksanakan secara rahasia dan bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Berapa banyak rakyat yang mempunyai hak memilih berdasarkan undang-undang mempergunakan haknya, juga bisa dijadikan ukuran sejauh mana tingkat kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara atau tingkat kesadaran politik warga negara.

Jika kita kaitkan dengan pendidikan politik pemilihan umum dapat dilihat sebagai salah satu sarana efektif dalam melakukan pendidikan politik rakyat. Menurut Tommi Legowo, (1987:608) bagi warga masyarakat, kampanye pemilihan umum merupakan bagian dari kegiatan pemilihan umum yang cukup menyedot perhatian. Kampanye merupakan kesempatan bagi para kontestan untuk mengadakan komunikasi langsung dan terbuka dengan para pendukung dan simpatisannya sedemikian rupa sehingga rakyat luas dapat tertarik untuk ikut serta mendukung mereka. Dalam kampanye, organisasi peserta pemilu menawarkan program-programnya secara terbuka dan jelas kepada rakyat, sementara rakyat menilai program-program yang ditawarkan tersebut dan kemudian boleh menolak atau menerima program-program tersebut. Dengan demikian, rakyat sebenarnya dituntut untuk menggunakan sarana berpikirnya agar dapat memberikan penilaian yang sewajarnya atas gagasan program yang ditawarkan tersebut. Secara demikian, kampanye Pemilu dapat dilihat sebagai mekanisme untuk pendidikan politik dan untuk "job training" bagi para pemimpin bangsa di masa depan.

Lebih lanjut Tommi Legowo (1987:608) menjelaskan bahwa pada masa kampanye, masing-masing kontestan beserta calon-calon dan juru kampanyenya dipaksa untuk menunjukkan kemampuannya dalam merumuskan, melontarkan

dan merasionalkan program-program organisasi mereka dalam bentuk isu-isu penting dan mendesak tentang usaha pembangunan bangsa. Tanggapan masyarakat terhadap isu-isu tersebut merupakan cerminan aspirasi masyarakat yang belum terumuskan secara baik. Akan tetapi, mungkin pula tanggapan itu merupakan reaksi terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berkembang pada saat itu. Dalam kaitan inilah para kontestan beserta jajarannya karena mereka adalah calon-calon wakil rakyat, wajib menangkap pesan dan merumuskannya aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat secara jujur dan benar. Sekali lagi kepekaan menangkap aspirasi dan pesan masyarakat serta kemampuan mereka untuk merumuskannya diuji kembali.

Pada sisi lain, Tommi Legowo (1987:603) mengemukakan bahwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, rakyat juga mengalami proses pendidikan politik. Materi dan janji program-program yang memenuhi hari kampanye dapat mendekatkan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya kepada nilai-nilai dan lembaga-lembaga politik kemasyarakatan yang berlaku, dan mengajarkan kepada mereka tentang karakteristik sistem yang berlangsung dan masalah bangsa dan negara yang mereka hadapi. Rakyat diperkenalkan pada masalah ekonomi, ekologi, pertanian dan pembiayaannya, hak-hak sipil dan tanggung jawab warga negara, dan tentang berbagai macam upaya yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Masa kampanye menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk mengerti dan memahami mengapa dan bagaimana kontroversi-kontroversi timbul dan kemudian diselesaikan, bagaimana lembaga-lembaga politik merumuskan permasalahan dan memrosesnya untuk dijadikan kebijaksanaan umum, bagaimana janji kampanye dipegang teguh dan dilaksanakan ataupun sebaliknya, bagaimana masa depan bangsa dirancang dan bagaimana masa lalunya diinterpretasikan. Dengan demikian, kampanye bukan sekedar arena untuk mencari pendukung, tetapi juga merupakan ajang pendidikan politik baik bagi masyarakat maupun bagi para kontestan peserta pemilihan umum.

Konsep pemahaman ini juga dikemukakan oleh Sudiharto Djiwandono (1983:202) bahwa pemilu sebagai suatu kebulatan, bagi warga yang telah memiliki hal pilih memberikan pengalaman praktis bagaimana mereka selaku warga

negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik kenegaraan dengan menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, bagi generasi muda yang belum memiliki hak pilih, pemilihan umum mendemonstrasikan secara nyata bagaimana mekanisme demokrasi berjalan, di mana pada saatnya nanti mereka juga akan terlibat langsung.

Dengan demikian, dapat kita lihat adanya korelasi positif antara pemilu dengan pendidikan politik. Di satu pihak pemilu dapat berfungsi sebagai pendidikan politik, di lain pihak pendidikan politik akan lebih memberikan arti terhadap pemilu. Melalui pendidikan politik yang berhasil, pemilihan umum akan lebih berfungsi dalam kehidupan demokrasi dan kehidupan kenegaraan pada umumnya.

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini, perlu diberikan kesimpulan berkaitan dengan upaya mendewasakan kehidupan demokrasi melalui pendidikan. Kesimpulan yang pertama, pendidikan politik penting untuk dilaksanakan karena mekanisme demokrasi akan berjalan dengan sehat jika didukung oleh tingkat kecerdasan warganya. Kesimpulan yang kedua, ada tiga jalan yang dapat ditempuh dalam upaya meningkatkan kesadaran politik rakyat, yaitu melalui pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, melalui pendidikan nonformal, melalui jalur organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi pemuda. Pendidikan politik juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan masyarakat. Kesimpulan ketiga, ada hubungan timbal balik antara pemilihan umum dan pendidikan politik. Pendidikan politik yang berhasil akan meningkatkan kadar implementasi demokrasi, sebaliknya pemilihan umum merupakan salah sarana untuk melaksanakan pendidikan politik.

Daftar Pustaka

- Andre Bayo Ala. 1985. *Hakikat Politik, Siapa Melakukan Apa Untuk Memperoleh Apa*. Yogyakarta: Akademika.
- Haryanto. 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miriam Budiardjo. 1977. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

- Padmo Wahyono. 1987. *Perwakilan di Bidang Kenegaraan*. Jakarta: Analisa.
- Rusli Karim. 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudiharto Djiwandono. 1983. *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*. Jakarta: Analisa.
- Tommi Legowo. 1987. *Evaluasi Kampanye Pemilu 1987*. Jakarta: Analisa.
- Yoga Soegama. 1986. *Perbandingan antara Demokrasi Eropa dengan Demokrasi Pancasila di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Cerita *Dewa Ruci* karya Bambang Suwarno, *Kangsa Lena* karya Subono, *Tresna* (cerita Samba juing) karya Purba Asamara, juga *Ramayana* yang disajikan di panggung Tri Murti Prambanan bukan November 1991 silam yang semua itu merupakan hasil garapan *pakeliran padat* akhir-akhir ini, mulai dari waktu, isi sampai dengan teknik penyajiannya memang sangat jauh berbeda bahkan bisa dikatakan *bumi-langit* dengan *pakeliran semalam*. Sebab, sudah banyak sekali pengembangan-pengembangan di dalamnya, seperti adanya gending-gending baru, atau gending-gending lama tetapi digarap seperti dipenggal, ditabrak, ditambah dikurangi dan sebagainya, yang lain pula *sulukan* juga selain dipenggal, ditabrak, ditambah dan dikurangi, penyuaranya tidak selalu dilakukan oleh dalang, tetapi juga *waranggono* atau *wirasuara*.

Tampak pula di dalamnya struktur adegan baru seperti *introduksi*, *prolog*, *epilog*, *flasback*, dan sebagainya, yang semua itu tidak biasa dilakukan dalam

Melihat garapan-garapan cerita di atas, *pakeliran padat* seakan-akan bukan pengembangan dari *pakeliran semalam*. Akan tetapi, jika melihat *pakeliran padat* cerita "*Wisrawa-Sukeksi*" karya Sumanto, "*Palguna-Palgunadi*" karya Bambang Murtiyoso dan "*Rama Tambak*" karya Bambang Suwarno yang digarap pada awal perintisan *pakeliran padat* kira-kira 15 tahun silam yang sekarang menjadi bahan/materi kuliah pedalangan STSI Surakarta, wujud pengembangan dari *pakeliran semalam* akan tampak jelas di dalamnya mulai dari waktu, isi sampai dengan teknik penyajiannya. "*Wisrawa-Sukeksi*" misalnya, waktu tidak kurang dari empat jam, isi ceritanya belum banyak berubah atau masih sama seperti dalam *pakem*, juga penyajiannya masih terbelenggu oleh *konvensi-konvensi pakeliran semalam*. *Janturan* pada jejer pertama misalnya, masih menggunakan kata-kata "*swuh rep data pitana*" Gendingnya pun masih Kabor, yang lain pula iringan *budhalan* dan *perangan* masih didominasi oleh *sampak* dan *srepeg*, demikian pula pada cerita "*Palguna-Palgunadi*" dan "*Rama Tambak*".

Adapun teknik-teknik baru seperti pemenggalan gending penabrakan, iringan *jengglengan*, *klonengan* dan *krompyangan* juga struktur adegan seperti *introduksi*, *prolog*, *epilog*, *flasback* dan sebagainya belum tampak sehingga rasa *pakeliran semalam* di dalamnya masih sangat tebal.

Kehadiran Pakeliran Padat di Tengah-tengah Masyarakat

Pakeliran padat yang demikian, awal kehadirannya di tengah-tengah masyarakat ternyata mendapatkan reaksi pro dan kontra.

Bagi masyarakat yang pro menyambutnya dengan rasa gembira, tentu saja dengan berbagai macam alasan yang mendasar. Bambang Murtiyoso, dosen senior STSI Surakarta, yang sempat penulis wawancarai Maret 1992 menyebutkan alasan masyarakat tersebut, karena *pakeliran padat* dianggap sebagai pengembangan yang sah dari *pakeliran* yang sudah ada saja, yakni *semalam*, yang tak ubahnya seperti bentuk *pakeliran semalam* sekarang ini yang menggunakan tambur, bedug, terompet yang sebenarnya juga merupakan pengembangan dari *pakeliran semalam* masa lampau yang belum mengenal instrumen semua itu.

Teknik yang diterapkan pada setiap unsur penyajian, dianggap suatu alternatif baru, juga dirasa lebih efektif daripada *pakeliran semalam*.

Dalam acara-acara khusus yang hanya tersedia waktu sedikit satu atau dua jam saja, *pakeliran padat* memiliki porsi yang jelas untuk bisa ditampilkan di dalamnya.

Bagi mereka yang kontra, tak jarang menyambutnya dengan suara-suara sumbang, tentu saja juga dengan alasan yang dianggap mendasar. Bambang Murtiyoso dalam wawancara yang sama pula menyebutkan alasan masyarakat tersebut, karena *pakeliran padat* dianggap sebagai kesenian bentuk baru yang bisa merusak tatanan budaya wayang yang sudah mapan.

Kehadiran teknik-teknik baru seperti pemenggalan, penabrakan, baik pada *sulukan* maupun gending yang sudah ada, dianggap suatu perbuatan semena-mena terhadap karya orang lain. Penghilangan adegan-adegan yang sudah biasa ditampilkan dalam *pakeliran semalam* dianggap merusak pakem.

Kehidupan Pakeliran Padat Sekarang Ini

Melihat kehadiran *pakeliran padat* di tengah-tengah masyarakat tersebut, sudah barang tentu perkembangan kehidupannya terhambat. Akan tetapi, karena diperjuangkan

secara terus menerus oleh para pendukungnya, lambat laun hambatan yang ada bisa teratasi, hingga sekarang ini perkembangan kehidupan *pakeliran padat* terlihat sangat menggembirakan. Ini bisa dilihat dari beberapa kali diselenggarakan lomba *pakeliran padat* misalnya, pesertanya cukup banyak. Adapun mereka yang pernah meraih juara dalam sekian kali perlombaan, antara lain Warsito, Warsono, Darmadi (putra Ki Manteb), yang terakhir (1991) adalah Purbo Asmoro. Penulis sendiri sebagai seorang dalang pernah pula meraih juara dua tingkat kabupaten.

Dalam acara-acara yang memang hanya tersedia waktu sedikit, satu atau dua jam saja, seperti dalam acara tv, wisata tari Ramayana di panggung Trimurti Prambanan, yang ditampilkan selama ini adalah *pakeliran padat*.

Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, seorang buruh seperti sopir, guru, pegawai kantor atau yang lain merasa berat untuk melihat wayang semalam suntuk, mengingat paginya harus berangkat untuk bekerja. Maka, *pakeliran padat* yang bisa menyelesaikan cerita secara utuh dalam waktu singkat, dirasa lebih tepat sehingga setiap kali ditampilkan *pakeliran padat*, penontonnya cukup banyak.

Melihat perkembangan kehidupan *pakeliran padat* tersebut, tidak diragukan bahwa untuk sekarang telah diakui eksistensinya dan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.

Prediksi Akan Adanya Perubahan Persepsi Masyarakat terhadap Pakeliran Semalam

Melihat perkembangan *pakeliran padat* sekarang ini, tidak menutup kemungkinan jika suatu saat akan bisa menggeser kehidupan *pakeliran semalam* yang sebenarnya tidak diinginkan oleh siapa pun, termasuk penulis sendiri. Ini disebabkan oleh *pakeliran padat* yang lebih bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat sekarang. Oleh sebab itu pula, akan bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap *pakeliran semalam*. *Pakeliran semalam* yang iagung-agungkan selama ini, teknik-teknik penyajian yang digunakan dirasa ketinggalan, cerita yang banyak disisipi adegan-adegan yang tidak prinsip, seperti *gapuran, limbukan, kedhatonan, cakilan* dianggap dangkal dan menghambur-hamburkan waktu saja karena sebenarnya tanpa adegan itu pun tidak akan kehilangan isi cerita.

Dalam *pakeliran semalam* seperti hanya akan menampilkan satu tokoh saja dalam *babak unjal* yang selalu diberi *pocapan* terlebih dahulu, juga dengan gending-gending tersendiri yang serba panjang misalnya, dianggap tidak selaras dengan isi yang ditampilkan karena teknik penyajiannya sangat berlebihan.

Dalam *pakeliran semalam* pula, jika dalang tidak segera *nyuwuk* gending yang sebenarnya *janturan* telah selesai, penonton merasa tergeser posisinya, semula melihat wayang, menjadi hanya mendengarkan gending semata.

Cakepan sulukan seperti "*leng-leng-ramyaningkang*" yang biasa digunakan dalam *pakeliran semalam* untuk mengiringi *jejeran* Hastina, akan dianggap tidak memberi dukungan terhadap suasana adegan. Sebab, isi *cakepan* membicarakan tentang tempat tidur Banowati, sedang adegannya sering membicarakan tentang bencana, wahyu atau yang lain.

Kesimpulan

Pakeliran padat yang dianggap sebagai bentuk baru tersebut, sebenarnya hanyalah merupakan pengembangan dari *pakeliran semalam* yang sudah ada sebagaimana yang biasa dilihat sekarang, yang juga merupakan pengembangan dari *pakeliran semalam* tempo dulu. Maka kehadirannya tidak perlu ditolak karena memang kesenian bentuk apa pun harus dikembangkan. Ini sesuai dengan pernyataan Rendra dalam "Mempertimbangkan Tradisi" (1983) bahwa tradisi termasuk pula seni tradisi yang sudah ada, tidak lagi memberikan gairah hidupnya. Artinya, kesenian bentuk apa pun harus selalu dikembangkan. Karena *pakeliran padat* ternyata mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, maka perkembangan kehidupannya semakin subur.

Daftar Pustaka

- Hastanto, Sri. 1991. "Sapa Sira Sapa Ingsun". *KRM*.
20 November.
- Martono, Darso. 1972. *Sulukan Ringgit Wacucal Cengkok Mangkunegaran*. Surakarta: Yayasan Pasinaon Dalang Mangkunegaran.

- Rendra. 1983. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: Gramedia.
- Sukatno. 1985. Naskah Penyajian Pakeliran Padat Lakon "Gandamana Tundhung". Surakarta: Akademi Seni Karawitan Indonesia.
- Sutarno, Wignyo. 1972. Tuntunan Pedalangan lakon "Makutharama". Surakarta: Yayasan Pasinaon Dalang Mangkunegaran.
- Suwarno, Bambang. 1985. *Mengenal Pakeliran Padat*. Surakarta: Akademi Seni Karawitan Indonesia.

Tinjauan Buku

BUILDING CLASSROOM DISCIPLINE: FROM MODELS TO PRACTICE

Penulis Buku : C.M. Charles
Jumlah Halaman : 247
Tahun Terbitan : 1985 (Second Edition)
Penerbit : Longman Inc. New York
Peninjau : Suyanto, Ph.D.

Pendahuluan

Dilihat dari tahun penerbitannya, buku ini memang dapat dikatakan relatif tidak baru. Akan tetapi, jika dilihat dari adanya penerbitan ulang (second edition), buku ini memang masih memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan kebutuhan para pendidik dalam rangka mencari model dan cara untuk menciptakan disiplin kelas agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung secara optimal. Terlebih jika kita melihat sering terjadinya perilaku indisipliner di dalam kelas, jelaslah bahwa buku ini merupakan sumber informasi yang patut untuk dibaca baik oleh guru maupun dosen di perguruan tinggi sekalipun.

Diawali oleh introduksi, buku ini membahas dengan lugas mengenai berbagai persoalan dan harapan yang bisa muncul dari kelas berkaitan dengan masalah disiplin. Persoalan rendahnya disiplin di kelas muncul dengan berbagai manifestasinya. Sejak dari melamun, berbicara sendiri pada waktu guru menjelaskan pokok bahasan di kelas, sampai pada serangan fisik yang menjadikan guru sebagai targetnya. Persoalan itu memang mengancam efektivitas proses belajar-mengajar. Namun, upaya yang dengan sengaja untuk mengatasinya masih tergolong langka jika ingin mengatakan tidak ada sama sekali.

Dalam rangka mencari jawaban terhadap berbagai persoalan rendahnya disiplin kelas, penulis buku ini, masih dalam bagian introduksi, memberikan berbagai data empirik mengenai bentuk-bentuk pelanggaran perilaku (*misbehavior*) yang pernah dilakukan oleh siswa-siswa sekolah di Amerika Serikat.

Dari data itu akhirnya penulis mengajukan pertanyaan mengapa persoalan disiplin masih terus saja ada. Secara singkat penulis menjelaskan mengapa persoalan disiplin tetap persisten. Paling tidak ada tiga penyebabnya, kata penulis buku ini.

Pertama, siswa sekarang memang lebih sulit untuk dikendalikan di kelas. Hal ini terjadi karena siswa semakin kurang menghargai otoritas guru di kelas. Sehingga, apa yang dikatakan oleh guru tidak jarang justru kurang mendapatkan respon yang positif dari para siswa. Kondisi ini berawal dari perubahan sistem nilai di keluarga dan masyarakat di mana anak-anak muda pada umumnya semakin kurang menaruh rasa hormat pada orang-orang yang lebih tua dilihat dari kronologi usianya.

Penyebab kedua ialah karena sampai saat ini guru belum berhasil menemukan cara yang efektif dan sistematis untuk menangani perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di kelas. Dalam menghadapi fenomena-fenomena indisipliner di kelas guru hanya menjawabnya dengan cara-caranya sendiri yang hanya kadang-kadang saja berhasil. Cara-cara itu bahkan lebih banyak tidak berhasil. Apapun hasilnya, cara yang dilakukan oleh guru justru banyak yang bersifat otoriter. Kondisi inilah yang menyebabkan persoalan indisipliner menjadi resisten dan persisten. Keadaan ini pulalah yang ingin dijawab dan dipecahkan dalam buku ini.

Penyebab ketiga, disebutkan oleh penulis buku ini, yaitu: karena rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh guru, dan administrator akan arti pentingnya untuk menegakkan disiplin di kelas demi berlangsungnya proses belajar-mengajar yang efektif. Guru dan administrator lebih suka bersikap untuk tidak ambil risiko dan mendapat kesulitan dari para siswa yang melanggar disiplin kelas.

Selanjutnya sambil mendefinisikan indisipliner sebagai semua perilaku baik fisik maupun mental yang dapat menghambat proses belajar-mengajar, penulis buku ini juga memberikan tiga indikator yang menunjukkan adanya sistem disiplin yang baik di antara para siswa. Ketiga indikator itu meliputi: (1) tetap setia dengan tugas yang harus dikerjakan, (2) berperilaku dengan disertai tanggung jawab, dan (3) menunjukkan hubungan baik antarmanusia.

Mengapa disiplin kelas diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan ini hampir sama dengan menjawab pertanyaan:

mengapa masyarakat memerlukan "law enforcement" (pene-gakan hukum). Pada hakikatnya disiplin kelas diperlukan untuk menjamin terciptanya ketertiban proses bejalar-meng-ajar. Secara eksplisit penulis buku ini menyebutkan manfaat ditegakkannya disiplin kelas, yaitu untuk: (1) memungkinkan terjadinya prose belajar; (2) memelihara terjadinya sosialisasi; (3) menumbuhkan demokrasi; (4) memungkinkan terisinya kebutuhan-kebutuhan psikologis para siswa; dan (5) mencipta-kan rasa senang dalam kegiatan belajar.

Penulis buku ini juga mempertanyakan mengapa pene-gakan disiplin kelas menjadi persoalan yang sulit dipecahkan bagi guru? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis buku ini mengidentifikasi empat hakikat manusia berkaitan dengan masalah disiplin. Keempat hakikat manusia tersebut meliputi: (1) Kita tetap saja melakukan sesuatu sebagaimana orang lain menghendaki kita untuk melakukannya; (2) Selalu adanya pandangan bahwa adalah baik untuk meremehkan otoritas; (3) Adanya perbedaan kebutuhan, nilai, minat dan kemampuan di antara para siswa; (4) Sejalan dengan perkembangan usia, siswa juga mengalami kematangan psikologis yang pada gilir-annya banyak memiliki sikap dan perbuatan yang berbeda dengan standar orang tua (dewasa).

Model-model Disiplin Kelas

Untuk mengatasi masalah disiplin kelas akhirnya penulis buku ini mengajukan tujuh model penegakan disiplin. Masing-masing model itu dibahas dengan jelas dalam satu bab, sejak dari Bab 1 sampai dengan Bab 7. Pembahasan masing-masing model itu disertai dengan berbagai kasus, contoh, dan apli-kasinya di kelas. Ketujuh model itu adalah: (1) The Kounin Model; (2) The Neo-skinnerian Model; (3) The Ginnot Model; (4) The Glasser Model; (5) The Dreikurs Model; (6) The Jones Model; dan (7) The Canter Model.

Dalam Bab 1, Kounin Model mendapatkan pembahasan yang cukup sistematis oleh penulis buku ini. Dalam pema-hasannya itu penulis mengetengahkan gagasan kunci dari model itu. Ada lima gagasan kunci yang bisa digunakan sebagai prinsip untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang selama proses belajar-mengajar berlangsung di kelas.

Lima prinsip tersebut meliputi:

1. The Ripple effect. Prinsip ini mengatakan bahwa jika guru mengoreksi perilaku menyimpang seorang siswa maka dampaknya juga akan berpengaruh pada siswa lainnya.
2. Guru harus mengetahui secara persis apa saja yang terjadi di kelas. Kounin menyebutnya dengan prinsip *awereness* dan *withitness*.
3. Guru perlu menggunakan transisi yang mulus di antara kegiatan belajar satu dengan yang lainnya, dan harus bisa memanfaatkan momentum belajar dengan efektif. Kesalahan transisi bisa terjadi dalam bentuk *jerkiness* dan *Slow-downs*.
4. Guru harus tetap berupaya untuk memelihara kesadaran kelompok, dan menjaga agar tiap kelompok bertanggung jawab terhadap optimalisasi kegiatan belajar-mengajar.
5. Guru harus menghindari diri dari kegiatan-kegiatan belajar yang menimbulkan kejenuhan siswa.

Pada Bab 2, penulis buku ini menengahkan pembahasannya mengenai The Neo-Skinnerian Model. Pada model ini prinsip utama untuk menegakkan disiplin kelas dapat dilakukan dengan memodifikasi perilaku siswa sesuai dengan tujuan ideal proses belajar-mengajar. Perilaku siswa yang dimunculkan secara sengaja, bukan secara reflek (*operant behavior*), dapat dimodifikasikan melalui hukum-hukum psikologi behavioristik. Melalui prinsip-prinsip *reinforcement* beserta penjadwalannya, guru dapat melakukan modifikasi perilaku di kelas. *Reinforcement* dapat dijadwalkan baik secara interval maupun ratio. Dari kedua dasar penjadwalan itu dapat juga dikombinasikan baik secara *fixed* maupun *variable*. Menurut model ini, *reinforcement* juga dapat dibentuk baik secara negatif maupun positif untuk keperluan memodifikasi perilaku siswa di kelas. Dalam bab ini juga dibahas secara singkat akan bahayanya penggunaan hukuman pada proses belajar-mengajar dalam kaitannya untuk menegakkan disiplin siswa di kelas.

Bab 3 buku ini menjelaskan The Ginott Model. Dalam model ini dijelaskan bahwa disiplin merupakan serangkaian keberhasilan yang bersifat kecil. Unsur paling penting dalam penegakan disiplin siswa ialah tingkat disiplin guru itu sendiri. Guru yang tidak disiplin tentu saja sulit untuk memiliki siswa yang disiplin. Dikatakan, guru merupakan unsur

yang memiliki kekuasaan dan memiliki posisi untuk mengambil keputusan. Guru, oleh karena itu, harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Agar disiplin dapat ditegakkan, model ini menawarkan banyak petunjuk untuk guru, antara lain: (1) Berikan pesan yang wajar, dan jangan mengutuk-utik karakter siswa secara pribadi; (2) Tunjukkan kemarahan tepat pada waktunya; (3) Ajaklah siswa untuk melakukan kerja sama; (4) Pahami perasaan siswa; (5) Hindari memberikan label pada siswa; (6) Berbicaralah seperlunya jika meluruskan perilaku siswa; (7) Jadilah model yang manusiawi.

Bab 4 buku ini membicarakan The Glasser Model. Untuk memahami model ini guru perlu menyimak dengan seksama gagasan penting dari Glasser yang digunakan untuk mengendalikan perilaku menyimpang para siswa. Menurut model ini ada beberapa prinsip yang harus diketahui guru agar disiplin kelas dapat ditegakkan. Prinsip-prinsip itu meliputi: (1) Siswa merupakan makhluk yang rasional. Namun demikian, mereka tidak dapat mengendalikan semua perilakunya; (2) Pilihan-pilihan yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Begitu pula sebaliknya, pilihan-pilihan kegiatan yang jelek akan membuahkan perilaku yang jelek; (3) Guru harus selalu membantu dalam menentukan pilihan-pilihan kegiatan yang bersifat baik bagi siswa; (4) Guru yang memperhatikan siswa secara tulus harus tidak mentolerir berbagai alasan atas terjadinya perilaku yang jelek; (5) Konsekuensi yang rasional harus selalu diberikan kepada siswa apakah itu terhadap perilaku yang baik maupun terhadap perilaku yang menyimpang; (6) Tata tertib atau peraturan kelas merupakan unsur yang penting dan harus ditegakkan berlakunya; (7) Pertemuan kelas merupakan sarana yang baik untuk membahas masalah-masalah peraturan kelas, perilaku, dan disiplin.

Dalam Bab 5, buku ini membahas The Dreikurs Model. Pencetus model ini, Dreikurs, menyebutkan bahwa model ini juga lazim diistilahkan dengan: Menghadapi tujuan-tujuan yang keliru. Dalam model ini ada prinsip penting yang perlu diperhatikan agar guru dapat menghadapi tujuan-tujuan yang keliru dalam proses belajar-mengajar dalam rangka menegakkan disiplin kelas.

Prinsip penting itu antara lain: Pertama, disiplin bukanlah identik dengan hukuman. Sebaliknya, disiplin merupakan

hasil upaya guru untuk mengajar memberikan batasan-batasan tertentu pada siswa. Prinsip kedua, mengatakan bahwa guru yang demokratik akan mampu memberikan bimbingan dan kepemimpinan yang kuat. Dikatakan dalam prinsip berikutnya bahwa semua siswa ingin memiliki sesuatu. Mereka juga menginginkan status dan penghargaan. Semua perilaku mereka menunjukkan upayanya untuk memiliki sesuatu.

Prinsip keempat menyebutkan bahwa perilaku menyimpang siswa mencerminkan keyakinan yang keliru yang akan mengarahkan kemauan siswa untuk dihargai. Prinsip kelima menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan akibat dari adanya tujuan-tujuan siswa yang keliru, yaitu tujuan untuk: memperoleh perhatian dan kekuasaan di tengah-tengah siswa lainnya, melakukan balas dendam, dan juga merupakan indikator ketidakmampuan. Oleh karena itu, prinsip berikutnya merekomendasikan agar guru mengidentifikasi tujuan-tujuan siswa yang keliru tersebut dan berupaya untuk tidak memberikan *reinforcement* sama sekali.

Prinsip ketujuh, dikatakan bahwa para guru harus mendorong upaya-upaya yang dilakukan siswa, tetapi jangan memuji pekerjaan atau karakter mereka. Prinsip ini jelas lebih mementingkan upaya daripada hasilnya. Prinsip yang terakhir menghendaki agar guru meyakinkan para siswa bahwa akibat yang tidak menyenangkan akan selalu mengikuti perilaku yang tidak pada tempatnya. Jika guru memahami prinsip-prinsip tersebut di atas baru bisa diharapkan dapat menciptakan disiplin kelas dengan cara yang wajar dan masuk akal.

Model keenam yang ditawarkan oleh penulis buku ini adalah The Jones Model. Model ini pada prinsipnya memberikan cara pada guru untuk menegakkan disiplin kelas dengan menggunakan bahasa tubuh dalam arti fisik. Oleh karena itu, guru harus pandai menggunakan penampilan fisik mereka untuk menciptakan disiplin kelas. Bahasa tubuh yang bisa digunakan untuk menjaga disiplin kelas, seperti kontak mata, kedekatan guru dengan siswa secara fisik, arahan-arahan gerakan tubuh, ekspresi raut muka, isyarat-isyarat. Ini semua dapat digunakan untuk menegakkan disiplin kelas jika guru memahami teknik mengenai bagaimana dan kapan menggunakannya. Pandangan mata guru jelas memiliki makna yang dalam bagi seorang siswa. Begitu juga siswa yang duduknya

berdekatan dengan guru memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan perilaku yang menyimpang.

Model terakhir (pada Bab 7) yang dibahas oleh penulis buku ini ialah The Canter Model. Model ini menitikberatkan tanggung jawab guru di dalam kelas sebagai guru. Agar guru bisa menegakkan disiplin kelas, ia harus memaknai tanggung jawab itu secara positif. Dari sini kemudian guru menterjemahkan tanggung jawab itu menjadi tindakan-tindakan yang positif, dan memperhatikan kepentingan-kepentingan siswa. Model ini tidak menghendaki adanya penyalahgunaan kekuasaan guru di kelas sehingga perilaku kasar, mengancam, dan melakukan intimidasi sangat dikutuk dalam model ini. Perilaku seperti ini tidak akan bisa menegakkan disiplin di kelas. Sebaliknya, tindakan-tindakan guru yang tenang, positif, menunjukkan kepada para siswa bahwa ia sangat memperhatikan kebutuhan mereka. Pada gilirannya keadaan seperti ini akan mampu menciptakan iklim bagi tumbuhnya disiplin kelas yang luwes (*assertive discipline*).

Komentar Peninjau

Tujuh model tersebut di atas dibahas oleh penulis buku ini secara sistematis. Contoh-contoh disertakan secara melimpah dengan disertai teori-teori dasar yang mendukungnya. Oleh karena itu, memang pantas buku ini memiliki judul sebagaimana yang tertera, "Building Classroom Discipline: From Model to Practice". Pengarang telah berhasil memberikan model-model itu beserta gambaran kongkrit bagaimana cara memberlakukannya di kelas.

Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran di Indonesia, guru maupun dosen yang mencintai profesinya tentu akan bisa memetik manfaat dari buku ini jika sekiranya ingin melakukan investasi akademik dengan meluangkan waktu untuk membacanya. Jika sekiranya investasi itu telah terlaksana, maka langkah kedua ialah melakukan adopsi dan adaptasi terhadap berbagai model yang ada untuk kepentingan proses belajar-mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di kelas masing-masing dalam kaitannya untuk menciptakan atmosfer kelas yang penuh dengan semangat untuk tercapainya tujuan belajar-mengajar yang terdisiplin.

BIODATA PENULIS

L. Andriani Purwastuti, lahir di Yogyakarta 30 Oktober 1959. Lulus Fakultas Filsafat UGM tahun 1983. Staf pengajar Jurusan MKDU FPIPS IKIP Yogyakarta sejak 1987, dengan mata kuliah Filsafat Pancasila.

Y. Nurasih, lahir di Yogyakarta 12 Maret 1959. Lulus Fakultas Sastra UGM tahun 1985. Staf pengajar Jurusan MKDU FPIPS IKIP Yogyakarta sejak 1987 dengan mata kuliah Ilmu Budaya Dasar.

Sunomo, lahir di Kudus 28 November 1956. Lulus Sarjana Pendidikan Teknik Listrik FKT IKIP Yogyakarta 1984. Guru STM Migas Cepu 1984-1985, Staf pengajar Jur. Teknik Elektro FPTK sejak 1986. Mengikuti Workshop-seminar Instrumentasi elektronika kedokteran di PAU elektroteknik ITB 1987, Karya ilmiah: Pemanfaatan IC LM 317T sebagai pengisi baterai ekonomis.

Karim Th. lahir di Gombang 24 Agustus 1956. Lulus Sarjana Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Yogyakarta 1982, Sarjana Utama Kimia Organik EPS UGM 1989. Karya tulis a.l.: Menentukan tetapan hidrolisis garam yang berasal dari berbagai reaksi asam-basa (UT Jakarta, 1987); Isolasi senyawa flavonoid dalam daun dari tanaman katesan (JK, 1990), Apa dan Bagaimana Asam Asetat (IPA Bandung, 1991); Sumbangan Kimia Organik dalam usaha pelestarian proses pewarnaan pembuatan batik (CP, 1991). Penelitian dua tahun terakhir: Isolasi senyawa karbonil di dalam umbi kayu menggunakan metode kromatografi lapis tipis (1991); Efektivitas penggunaan katalisator dehidrogenasi sintesis asam benzoat dari benzaldehida dengan basa (1991); Isolasi etilasetoasetat dari hasil kondensasi claisen (1989); Hambatan pelaksanaan PPL Mahasiswa FPMIPA (1989); Kesesuaian Materi Kurikulum SMTA tahun 1984 dengan Kurikulum Kimia FPMIPA tahun 1990 (1992).

Bambang Setiyo Hari Purwoko, lahir di Purworejo 6 Oktober 1960. Dosen Jurusan Teknik Mesin FPTK IKIP Yogyakarta. Karya penelitian a.l.: Pengaruh kedalaman pemakanan terhadap efisiensi pemakaian energi listrik pada proses pem-

bubutan baja lunak; Faktor penghambat pemanfaatan hasil praktik sekolah kejuruan kelompok rekayasa (STM) se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Cornelia Budimarwanti, lahir di Bantul 30 Maret 1966. Lulus Sarjana Kimia FMIPA UGM 1989. Menjadi Staf pengajar Jurdik Kimia FPMIPA IKIP Yogyakarta sejak 1990. Karya ilmiah: Isolasi senyawa karbonil di dalam umbi kayu menggunakan metoda kormatografi lapis tipis (1990); Penyimpangan informasi genetik dalam tubuh makhluk hidup (1990); Senyawa mutagen dan karsinogen dalam laboratorium kimia (1990).

S. Bayu Wahyono, lulus Sarjana Ilmu Komunikasi Fisipol UGM 1985, staf pengajar Jurusan Teknologi Pendidikan FIP IKIP Yogyakarta sejak 1986. Anggota Pengembangan Ilmu Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) cabang Yogyakarta, dan aktif menulis di berbagai media massa terbitan Jakarta maupun daerah.

Suwarna, lahir di Klaten 1 Februari 1964. Lulus Sarjana Pendidikan Bahasa Daerah 1988 dengan skripsi: "Kata Kerja Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia Suatu Studi Perbandingan dan Pengajarannya di SPG (1988). Staf pengajar Jurusan Bahasa daerah FPBS IKIP Yogyakarta ini sekarang sedang studi S2 Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Malang. Karya ilmiah, antara lain: Alih Kode dan Campur Kode dalam Tajuk Rencana Surat Kabar di DIY (1990); Perbedaan Kemampuan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa dalam Melagukan Tembang Berhuruf Jawa dan Latin (1991). Aktif menulis di Majalah Mekar Sari dan Panyebar Semangat.

Kus Eddy Sartono, lahir di Yogyakarta 3 Maret 1961. Lulus Sarjana Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM 1986. Sejak 1987 menjadi staf pengajar di jurusan MKDU FPIPS IKIP Yogyakarta, mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian dan mentalitas mahasiswa, di antaranya: Pendidikan Kewiraan. Aktif melakukan penelitian, saat ini sedang diteliti adalah "Aspek-aspek Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilu 1992". Aktif menulis karya ilmiah, di antaranya di CP edisi Dies Mei 1991: Kancan Pendidikan dalam Upaya Pelestarian dan Penerusan Kepribadian Budaya Bangsa.